KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

VEMENTERIAN KEHANCAN BI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 4 3 7			H.4 X Final		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 0 6 3 6 3 4 4 0 6 7 2 2 0 0 1							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : ANITA LELIYANI C.							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	1.999.300	1.999.300	0	15	299.895	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
	ansi Pemerintah :		0		1 IN/ANITAN	I TIMI ID	
		KOWAIT SAKIT SIWA DAL	TATTATIVIA 1103ADA WATAN	AMFROVINSINA	LIIVIANTAN		
	Organisasi :						
C.4 Tanggal	:	1 3 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
	andatangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataar	ı Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	pahwa bukti Pemotongan/Pemungu 	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak Ilukan tanda tangan.	t mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

UL28KXG2